

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dalam keadaan waktu yang sangat lama, Indonesia berada dalam tangan para penjajah yang telah banyak menguras sumber daya alam serta tenaga rakyat Indonesia. Keadaan tersebut menjadikan memori pahit harus terukir dalam diri setiap rakyat Indonesia yang turut berduka merasakan perihnya penindasan. Tentu tidak akan ada satu pun orang yang ingin kembali mengulang pengalaman tidak menyenangkan seperti pada masa itu. Terlebih lagi jika teringat bahwa kemerdekaan Indonesia ini berhasil diperoleh dengan menempuh berbagai cara serta perjuangan yang berat.

Periode awal kemerdekaan menjadi fase krusial dalam sejarah Indonesia yang mencerminkan perjuangan dan ketahanan suatu bangsa dalam mencapai kemerdekaan sebagai tujuan bersama yang harus diraih. Pada masa ini, Indonesia yang baru memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 harus dihadapkan dengan situasi sosial, ekonomi maupun politik yang masih belum stabil. Ketika Indonesia dalam keadaan sedang menata keadaan negara yang baru merdeka, Belanda di sisi lain justru merancang upaya untuk menjajah kembali Indonesia. Dalam hal ini, Belanda atau pasukan NICA (*Nederlands Indies Civil Administration*) bersama dengan pasukan Sekutu berhasil tiba di Tanjung Priok pada tanggal 29 September 1945 (Poesponegoro & Notosusanto, 2019).

Sejak kedatangan Belanda ke Indonesia, tentara NICA yang berada di bawah perlindungan tentara Sekutu mulai melakukan kerusuhan, teror, dan mengadakan patroli yang membuat situasi negara Indonesia menjadi kacau (Madjiah, 1993). Bahkan pada tahun 1946 terjadi perpindahan Ibukota dari Jakarta ke Yogyakarta (Ricklefs, 2007). Kehadiran tentara Sekutu dan NICA memang mengancam keamanan dan kedaulatan bangsa Indonesia, yang pada sendirinya menimbulkan perlawanan-perlawanan di beberapa daerah. Pemerintah Indonesia akhirnya berusaha untuk menyelesaikan pertikaian menggunakan jalur diplomasi melalui serangkaian perundingan dengan pihak Sekutu dan Belanda.

Strategi diplomasi yang tidak mencapai keberhasilan menyebabkan Belanda pada 21 Juli tahun 1947 mengadakan aksi Agresi Militer 1 dengan melakukan penyerangan dan pendudukan di beberapa wilayah Indonesia. Pada saat itu, Belanda juga tengah berupaya untuk memutus jalannya roda perekonomian Indonesia dengan melakukan blokade untuk menimbulkan situasi sosial dan ekonomi yang buruk (Poesponegoro & Notosusanto, 2019). Pada pelaksanaan blokade ini, Angkatan Laut Belanda menutup pelabuhan-pelabuhan Republik dengan ketat (Nurlaelah, 1992). Berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia pun terkena dampaknya, termasuk masyarakat Banten yang juga mengalami permasalahan karena blokade.

Banten pada masa awal kemerdekaan merupakan salah satu wilayah Keresidenan di Provinsi Jawa Barat. Keresidenan Banten tersebut terbagi menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan

Kabupaten Pandeglang. (Lubis, 1993). Banten sendiri memiliki peranan yang penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagai wilayah yang sepenuhnya mendukung kemerdekaan dengan melakukan berbagai perlawanan terhadap penjajahan. Namun pada sisi lain, Banten juga harus mengalami kesulitan selama periode tersebut karena dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di wilayah itu.

Banten menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang tidak luput dari dampak situasi nasional yang penuh gejolak pada masa awal kemerdekaan, seperti aksi pemberontakan Dewan Rakyat yang dipimpin oleh Ce Mamat pada Oktober tahun 1945 karena penolakannya terhadap pengangkatan pejabat lama yang dianggapnya masih berhubungan dengan kolonial. Pemberontakan Dewan Rakyat ini berakhir setelah berhasil ditumpas pada tahun 1946. Kemudian Banten juga berpolemik dengan pemerintah pusat karena adanya desas-desus bahwa Banten akan menghidupkan keraton lama. Selain itu, seruan Kartalegawa yang menyebut Banten sebagai bagian dari Negara Pasundan juga dimanfaatkan NICA untuk menyebarkan berita tersebut yang tentunya disanggah oleh Pemerintah Banten.

Kondisi Banten selama awal kemerdekaan yang masih dipenuhi serangkaian masalah harus dihadapi dengan aksi Belanda yang memberlakukan blokade ekonomi di wilayah tersebut. Di mana sejak akhir tahun 1946, aktivitas operasi laut yang dilakukan kapal-kapal Belanda di wilayah Banten dan Selat Sunda mulai mengalami peningkatan (Michrob & Chudari, 1993). Hal tersebut rupanya menunjukkan bahwa Belanda sedang

bersiap untuk melakukan penyerangan. Kemudian terlihat pada aksi Agresi Militer I pada tahun 1947, pertempuran-pertempuran di perbatasan seringkali terjadi namun tidak menembus Banten. Ketika itu Belanda hanya menyerang dan menduduki beberapa daerah sekitar Banten seperti Jakarta, Bogor, Tangerang dan Sukabumi (Madjiah, 1993). Dengan dikuasainya wilayah-wilayah tersebut, Banten pun akhirnya menjadi terkepung.

Isolasi Belanda terhadap Banten dilakukan dengan mengadakan penjagaan di sepanjang garis pertahanan yang membujur dari Mauk sebelah Utara ke Selatan sampai ke Pantai Laut Hindia. Belanda juga melakukan blokade laut dengan mengawasi perairan Selat Sunda secara ketat dengan kapal perang Belanda yang sering patroli di dekat pelabuhan Merak. Aksi blokade Belanda tersebut menyebabkan berbagai kegiatan ekonomi menjadi terganggu karena Belanda menjaga ketat daerah perbatasan terhadap arus orang dan barang kebutuhan sehari-hari yang masuk dan keluar dari wilayah Banten (Suharto, 1996). Pada akhirnya masyarakat Banten harus mengalami kendala dalam distribusi barang-barang kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan obat-obatan (Erniwati, 2019). Meskipun demikian, saat itu mereka tetap berusaha mengatasi kesulitan ekonomi, seperti halnya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

Upaya yang dilakukan masyarakat Banten untuk mengatasi masalah ekonomi karena blokade Belanda, tidak dapat dilepaskan dari adanya kontribusi pemimpin daerah dalam memastikan keberlanjutan perekonomian serta kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di tengah

situasi dan kondisi yang sulit. Dalam konteks ini, K.H. Tb. Achmad Chatib selaku kepala pemerintah daerah Banten berperan mengatasi kesulitan yang dialami Banten karena blokade melalui strateginya memperluas lahan dan produksi serta mendorong masyarakat agar mandiri sehingga Banten dapat berswasembada. Ia juga memanfaatkan Perusahaan Alim Ulama (PAU) agar masyarakat dapat memperoleh tekstil serta mengendalikan hasil-hasil daerah sehingga barang-barang kebutuhan dapat diawasi. Adapun kebijakannya dalam sistem alat tukar dilakukan dengan memberlakukan Uang Republik Indonesia Daerah Banten (URIDAB) sebagai mata uang darurat yang berlaku sementara dan digunakan masyarakat dalam bertransaksi sehari-hari dan memberikan kelonggaran untuk barter.

Tubagus Achmad Chatib bin Waseh Al Bantani lahir di Kampung Gayam, Desa Cadasari, Kabupaten Pandeglang, pada bulan Mei 1890. Ia merupakan residen pertama Banten pasca Indonesia merdeka dan terjadi kekosongan kekuasaan di Banten. Sosok K.H. Tb. Achmad Chatib memang sangat dikenal dalam kalangan masyarakat Banten sebagai ulama terkemuka yang sangat berpengaruh. Ia memiliki pengalaman politik karena telah bertahun-tahun bergabung di Sarekat Islam (Williams, 2003). Selain itu, ia juga dikenal karena perjuangannya untuk Indonesia sejak masa kolonial sekaligus karena keterlibatannya dalam berbagai peristiwa penting yang terjadi di Banten. Seperti pada saat ia menggerakkan para pengikutnya dalam pemberontakan tahun 1926 serta perjuangannya dalam masa revolusi mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pada 10 September 1945, K.H. Tb. Achmad Chatib terpilih dan diangkat secara resmi menjadi Residen Banten oleh Presiden Soekarno. Sebagai Residen Banten, K.H. Tb. Achmad Chatib turut melaksanakan tugasnya dalam menyusun personalia pemerintahan seperti membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR) serta tetap mempertahankan pejabat lama dengan mengangkat Aria Hilman Djayadiningrat sebagai Bupati Serang, Djumhana Wiriaatmadja sebagai Bupati Pandeglang dan Hardiwinangun sebagai Bupati Lebak. Selain itu, K.H. Tb. Achmad Chatib juga turut serta dalam menangani berbagai masalah yang harus dihadapi Banten sejak awal kemerdekaan, termasuk masalah ekonomi karena blokade Belanda yang bertepatan dengan aksi Agresi Militer pada tahun 1947 (Ali, 2020). Diperlukan strategi dan tindakan yang tepat untuk dapat melindungi keberlanjutan perekonomian Banten pada masa yang sulit dalam perjalanan sejarah Indonesia tersebut.

Penulisan sejarah mengenai wilayah lain di Indonesia pada periode revolusi telah banyak dilakukan. Namun penulis memiliki beberapa alasan mengapa memilih wilayah Banten, khususnya memilih K.H. Tb. Ahmad Chatib dalam penelitian ini. Pertama, Banten sebagai wilayah asal penulis pernah menjadi wilayah Kesultanan sehingga sejak dahulu terkenal akan nuansa islami yang memperhitungkan peranan kaum ulama. Kedua, pada saat Belanda melancarkan aksi Agresi Militer I, Banten menjadi satu-satunya daerah di Jawa Barat yang tidak diduduki dan terus diserang melainkan diblokade namun bisa tetap bertahan serta berdiri di belakang

pemerintah RI meski perhubungan sukar. Ketiga, dari beberapa penelitian terkait K.H. Tb. Achmad Chatib lebih membahas perannya di bidang agama, politik, dan pendidikan. Namun belum pernah diteliti secara khusus tentang peran dan perjuangannya di bidang ekonomi yang mengatasi kesulitan-kesulitan di Banten saat Belanda mengisolasi wilayah tersebut pada periode tahun 1947-1949. Sehingga penelitian ini menarik untuk diteliti serta dapat menjadi penguat untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Penelitian relevan yang pernah diteliti diantaranya yaitu penelitian yang ditulis oleh Lasmiyati pada tahun 2012 dengan judul “Sejarah Uang Republik Indonesia Banten (URIDAB) (1945-1949)” yang membahas latar belakang pemberlakuan URIDAB mulai dari awal pencetakan hingga penarikan dari peredaran yang dilihat dari faktor ekonomi dan politik. Kemudian penelitian kedua yang relevan ditulis oleh Resti Octavia pada tahun 2020 dengan judul "Banten dalam Masa Blokade Ekonomi Tahun 1945-1949" yang membahas kondisi Banten selama masa blokade dan upaya pemerintah mempertahankan Banten dari segi politik. Lalu ada pula penelitian relevan yang ditulis oleh Abdul Rohman pada tahun 2023 dengan judul “Sejarah Pemikiran Pendidikan KH. TB. Achmad Chatib di Banten Pada Tahun 1948-1966” yang membahas kontribusi K.H. Tb. Achmad Chatib melalui pemikiran di bidang pendidikan yang diimplementasikan dalam usahanya membangun lembaga pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dikarenakan penelitian ini

membahas aksi blokade ekonomi Belanda terhadap Banten dengan secara lebih khusus menyoroti strategi dan kebijakan K.H. Tb. Achmad Chatib selaku residen Banten dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang timbul akibat blokade dari segi ekonomi. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa K.H. Tb. Achmad Chatib sebagai residen Banten yang menjabat kala itu, berperan penting untuk turut serta bekerja sama dengan pejabat, instansi, serta masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat serta mempertahankan wilayah Banten saat terisolasi.

Urgensi dari meneliti topik ini adalah dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu sejarah, khususnya bagi sejarah lokal Banten pada awal kemerdekaan serta bagi peningkatan apresiasi dan kesadaran masyarakat luas terhadap nilai-nilai perjuangan tokoh yang terlibat dalam berbagai peristiwa sejarah, juga terhadap perjuangan segala unsur masyarakat yang tetap berpegang teguh mempertahankan kemerdekaan serta dalam menghadapi kesulitan akibat blokade ekonomi Belanda di wilayah tersebut. Sehingga untuk menuju pemahaman yang lebih baik, penelitian ini penting untuk dilakukan agar kita dapat melihat sisi lain perjuangan pada periode revolusi selain konflik bersenjata dan diplomasi.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada K.H. Tb. Achmad Chatib yang dibatasi pada upaya dan kontribusinya dalam menghadapi blokade ekonomi di

Banten. Selain itu, penelitian ini juga dibatasi pada rentang waktu antara tahun 1947-1949. Hal yang mendasari pengambilan rentang waktu seperti itu adalah karena tahun 1947 merupakan awal di mana Belanda melaksanakan blokade ekonomi terhadap wilayah Banten bersamaan dengan aksi Agresi Militer I. Adapun tahun 1949 merupakan masa di mana Belanda mengakhiri blokade ekonomi di Banten yang ditandai dengan berhentinya aktivitas patroli serta pengakuan kemerdekaan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) dan kembalinya Banten sebagai wilayah Republik Indonesia.

2. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aksi Belanda dalam melaksanakan blokade ekonomi terhadap Banten?
2. Bagaimana K.H. Tb. Achmad Chatib mengatasi masalah-masalah ekonomi di Banten?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan blokade ekonomi Belanda serta dampaknya terhadap wilayah Banten
2. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh K.H. Tb. Achmad Chatib dalam mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi yang dialami

Banten karena blokade ekonomi Belanda, sekaligus menjelaskan reaksi masyarakat Banten terhadap upaya tersebut dengan menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna sebagai bahan bacaan yang memperkaya penulisan sejarah Indonesia, khususnya sejarah lokal Banten berkaitan dengan blokade ekonomi dan kontribusi K.H. Tb. Achmad Chatib dalam mengatasi masalah ekonomi di Banten.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi persoalan terkait ekonomi. Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sumber bantuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan.

D. Metode dan Bahan Sumber

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan sejarah, yaitu suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan dari masa lampau (Gottschalk, 1985). Adapun dalam pengumpulan sumber sejarah, dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu teknik mengumpulkan data dengan menelusuri bacaan-bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dipecahkan (Nazir, 2009). Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

sejarah dengan pendekatan deskriptif-naratif, yaitu dilakukan dengan menuliskan sejarah secara deskriptif yang bukan hanya sekedar menyusun fakta (Kuntowijoyo, 2008). Berikut ini tahapan dalam penulisan sejarah menurut Gottschalk yaitu sebagai berikut:

1. Heuristik

Dalam tahap heuristik ini, penulis mencari dan menemukan sumber primer maupun sumber sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun pada penelitian ini, untuk sumber primer yang penulis gunakan diantaranya adalah surat kabar *Merdeka*, Majalah *Merdeka*, surat kabar *Antara*, dan surat kabar *Berita Indonesia* yang terdapat di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Adapun untuk sumber sekunder, penulis menggunakan beberapa buku seperti buku *Sejarah Nasional Indonesia VI* karya Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, buku *Dokter Gerilya* karya Matia Madjiah, buku *Catatan Masa Lalu Banten* karya Halwany Michrob, dan A. Mudjahid Chudari, buku *KH. TB. Achmad Chatib (1890-1966), Jalan Hidup Dan Jejak Langkah Perjuangan Sang Residen Banten* karya Mufti Ali, buku *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* karya M. C. Ricklefs, buku *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 5: Agresi Militer Belanda I* karya A.H. Nasution, buku *Banten dalam Pergumulan Sejarah* karya Nina H. Lubis, buku *Pergolakan Daerah Pada*

Awal Kemerdekaan karya Audrey Kahin. Selain itu, terdapat sumber-sumber penunjang lainnya yang penulis gunakan seperti beberapa artikel jurnal, disertasi ataupun skripsi lain yang mempunyai tema maupun pembahasan sejenis.

2. Kritik Sumber

Setelah penulis mengumpulkan sumber-sumber sejarah, maka tahap selanjutnya adalah melakukan verifikasi atau kritik sumber. Dalam tahapan ini, penulis menguji autentisitas (keaslian sumber) dan kredibilitas (dapat dipercaya) sumber melalui kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dilakukan untuk menilai aspek luar dari sumber sejarah dengan memeriksa autentisitas sumber. Sedangkan kritik internal dilakukan untuk memeriksa kredibilitas terhadap aspek isi dari sumber sejarah yang telah ditemukan. Pada kritik eksternal penulis mengkritisi sumber secara fisik berupa surat kabar Merdeka No. 883 Tahun ke IV, Selasa 16 November 1948. Sumber ini penulis temukan langsung dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam bentuk mikrofilm. Adapun dapat terlihat dari sumber tersebut bahwa kertas yang tertera merupakan kertas lama dengan tulisan yang masih menggunakan ejaan lama. Sedangkan dalam hal kritik internal, penulis mengkritisi sumber sejarah dengan melakukan perbandingan isi pada buku Dokter Gerilya karya Matia Madjiah

dengan buku Catatan Masa Lalu Banten karya Halwany Michrob maupun dengan beberapa sumber primer dan sumber sekunder lainnya yang menyangkut tentang keadaan Banten serta upaya K.H. Tb. Achmad Chatib menangani masalah blokade ekonomi.

3. Interpretasi

Tahapan yang selanjutnya dalam metode penelitian sejarah setelah sumber sejarah telah diverifikasi adalah tahap penafsiran atau interpretasi. Interpretasi adalah menetapkan makna yang saling berkaitan melalui fakta atau data sejarah yang telah terkumpul sebelumnya melalui proses kritik. Dalam hal ini, fakta-fakta sejarah tersebut kemudian dihubungkan satu sama lain sampai membentuk suatu rangkaian yang rasional dan menunjukkan kesesuaian antara satu dengan yang lain. Pada proses ini, penulis memperoleh beberapa fakta sejarah seperti penjagaan Belanda terhadap arus orang maupun barang yang keluar masuk dari daerah Banten, kesulitan yang dialami masyarakat Banten dalam mencukupi kebutuhan pangan serta penerbitan mata uang darurat daerah Banten. Dari beberapa fakta yang telah dikemukakan, menunjukkan bahwa pada kala itu Belanda tengah melaksanakan blokade yang menimbulkan masalah-masalah ekonomi bagi Banten sehingga K.H. Tb. Achmad Chatib selaku residen yang menjabat kala itu berupaya untuk menghadapi persoalan blokade tersebut.

4. Historiografi

Pada tahap terakhir ini, setelah penulis melewati tahap heuristik (mengumpulkan sumber sejarah), tahap verifikasi (kritik eksternal dan kritik internal) dan tahap menginterpretasi sumber-sumber sejarah yang telah diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan tahap penulisan sejarah atau historiografi, yaitu menyusun fakta-fakta yang telah diinterpretasi ke dalam bentuk tulisan sesuai dengan pemahaman dan kata-kata penulis. Dalam hal ini, penulis menyimpulkan jawaban dari masalah-masalah yang menjadi kajian penelitian pada penulisan sejarah yang disusun secara kronologis berdasarkan keterkaitan antar peristiwa. Adapun untuk penyajian penelitian dalam bentuk tulisan sejarah tersebut mempunyai tiga bagian: (1) Pengantar, (2) Hasil Penelitian, dan (3) Simpulan (Kuntowijoyo, 2013).